



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA JAYAPURA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik, sehingga kami dapat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura selama tahun 2024 dalam upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Demikian LKjIP Tahun 2024 disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Jayapura.

Jayapura, 31 Januari 2025

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Jayapura**



Abdul Majid, S. Pd, M. MPd
Pembina Tingkat I
Nip. 19740328 200008 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1. Landasan Hukum.....	3
2. Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia	4
B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH	
INSTANSI.....	22
C. SISTEMATIKA.....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
A. RENCANA STRATEGIS	27
1. Visi.....	28
2. Misi.....	29
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Dan	
Kebudayaan Kota Jayapura.....	29
B. PROGRAM DAN KEGIATAN	34
C. PERJANJIAN KINERJA	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	53
B. CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	55
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja	55
2. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	60
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Dan Kegagalan	
/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan.....	79

BAB IV PENUTUP	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA....	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Jayapura.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Pangkat, Golongan dan Ruang PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura	20
Tabel 1.2	Jumlah Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura	21
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan struktural Tahun 2024 ..	21
Tabel 2.3	Keselarasan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura...	26
Tabel 2.4	Keselarasan Misi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Jayapura ..	31
Tabel 2.5	Rekapitulasi DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024	34
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024.....	36
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024	47
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan. Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	54
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024.....	57
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura	61
Tabel 3.4	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024.....	66
Tabel 3.14	Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura	80

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang-undangan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis Tahun 2024 sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu

penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura inidisusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e) Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Jayapura;

2. Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Dumber Daya

Berdasarkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura mempunyai tugas : “ *Membantu Walikota Dalam Melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Arahan Pimpinan Untuk Optimalisasi Pelaksanaan Tugas*”.

a) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi :
 - (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b) Sub Bagian Keuangan;
 - (c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal membawahi :
 - (a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - (b) Seksi Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga;
 - (c) Seksi Pembinaan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- 4) Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
 - (a) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - (b) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;
 - (c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

- 5) Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan:
 - (a) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
 - (b) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
 - (c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan.
- 6) Bidang Kebudayaan membawahi :
 - (a) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Bahasa dan Sastra Daerah;
 - (b) Seksi Pembinaan Kesenian;
 - (c) Seksi Sejarah dan Purbakala.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

b) Tugas dan Fungsi

- Kepala Dinas

- 1) Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan yang meliputi Pembinaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta urusan Kebudayaan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan;
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

- Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi : urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan dan asset, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana kinerja;

- 2) Penyelenggaraan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya;
- 3) Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan asset;
- 5) Penyusunan program dan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas;
- 7) Pelaksanaan SPI;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang umum dan administrasi kepegawaian, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- 2) Pelaksanaan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
- 4) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
- 5) Pelaksanaan administrasi umum lainnya;
- 6) Pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 - a. Pelaksanaan SPI;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan aset, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penyusunan RKA dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung dan administrasi aset;
- 4) Pelaksanaan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan aset;
- 5) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- b. Pelaksanaan SPI;
- 6) Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang perencanaan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program dan rencana kinerja Dinas;
- 2) Pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci;

- 4) Penyusunan SPM;
 - 5) Penyusunan SPP dan SOP;
 - 6) Penyusunan pengukuran IKM;
 - 7) Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan IKK dan IKU;
 - 8) Pelaksanaan SPI;
 - 9) Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
 - 10) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
 - 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**
- Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 4) Memfasilitasi penyediaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 5) Penelaahan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 6) Pelaksanaan SPI;

- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan atas capaian kinerja pelaksanaan tugas bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Pendidikan Anak Usia Dini**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mencakup layanan Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis dalam penyusunan rencana kerja. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan penyusun rencana kerja;
- 3) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- 5) Penelaahan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 6) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7) Pelaksanaan SPI;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan & Pendidikan Keluarga mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan Keluarga;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keluarga;
- 4) Penelaahan Ijin Operasional Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga;
- 6) Pelaksanaan SPI;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Pendidikan Pembinaan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Nonformal lingkup pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- 4) Pelaksanaan SPI;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Bidang Pendidikan Dasar**

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Bidang , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pendidikan dasar yang meliputi kurikulum, tenaga teknis dan sarana prasarana pendidikan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pendidikan dasar yang meliputi kurikulum, tenaga teknis dan sarana prasaranapendidikan dasar;
- 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar yang meliputi Pembinaan teknis kegiatan belajar mengajar Bidang Pendidikan Dasa, Penelaahan Ijin Operasional Bidang Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pembinaan tenaga kependidikan Bidang Pendidikan Dasar;

- 4) Pelaksanaan SPI;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar**

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang meliputi penyebarluasan petunjuk pelaksanaan kurikulum dan penyusunan bahan masukan penyempurnaan kurikulum Pendidikan Dasar serta memantau pelaksanaan kurikulum dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- 2) Perumusan kebijakan Kurikulum pendidikan dasar;
- 3) Pelaksanaan pembinaan Kurikulum pendidikan dasar yang meliputi Sosialisasi terkait informasi perkembangan kurikulum, Penyusunan petunjuk pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan, termasuk kurikulum muatan lokal dan seni budaya dan Penyusunan bahan masukan penyempurnaan kurikulum Pendidikan Dasar.
- 4) Pelaksanaan SPI;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

- **Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar**

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar lingkup kebutuhan guru Sekolah Dasar, penempatan, mutasi, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk melaksanakan tugas Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- 2) Perumusan kebijakan tenaga teknis pendidikan dasar;
- 3) Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pendidikan dasar yang meliputi Pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan dasar, Penyusunan rencana kebutuhan guru pendidikan dasar, Pengusulan penempatan, persebaran/mutasi guru, Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan baik kuaifikasi maupun kompetensinya dan Memberi pertimbangan atas usul ijin operasional bagi sekolah swasta berdasarkan hasil verifikasi data terkait tugas fungsinya.
- 4) Pelaksanaan SPI;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar**

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kepala Seksi ,melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar meliputi : merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, melaksanakan inventarisasi serta pembinaan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- 2) Perumusan kebijakan tenaga teknis pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dasar;
- 3) Pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- 4) Pelaksanaan inventarisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- 5) Pelaksanaan SPI;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Bidang Kebudayaan**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam Bidang urusan Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pendidikan kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Bidang Kebudayaan;
- 4) Pengelolaan kebudayaan masyarakat Port Numbay;
- 5) Pelestarian tradisi masyarakat Port Numbay;
- 6) Pembinaan lembaga adat, kesenian dan sejarah lokal masyarakat Port Numbay;
- 7) Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana Bidang Kebudayaan;

- 9) Penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam Provinsi Papua;
 - 10) Pengelolaan museum daerah;
 - 11) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan;
 - 12) Pelaksanaan SPI; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- **Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Bahasa dan Sastra Daerah** Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan lingkup : pelestarian dan pengembangan budaya, bahasa dan sastra daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Bahasa dan Sastra Daerah mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan rencana dan program kerja;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan budaya, bahasa dan sastra daerah;
 - 3) Pengembangan budaya, bahasa dan sastra daerah;
 - 4) Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah;
 - 5) Penetapan dan Pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
 - 6) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana Bidang Kebudayaan;
 - 7) Penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam Provinsi Papua;
 - 8) Pemberian dukungan dan penghargaan di bidang budaya;
 - 9) Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan di bidang budaya;
 - 10) Pelaksanaan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;

- 11) Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka budaya bahasa dan sastra daerah;
- 12) Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah;
- 13) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah;
- 14) Pelestarian tradisi masyarakat Port Numbay;
- 15) Pembinaan lembaga adat masyarakat Port Numbay;
- 16) Pelaksanaan SPI;
- 17) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Pembinaan Kesenian**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Kepala Seksi , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan lingkup pembinaan kesenian. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan kesenian daerah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- 4) Pelaksanaan inventarisasi ragam jenis kesenian lokal Port Numbay;
- 5) penyusunan bahan pembinaan kesenian baik di sekolah maupun kelompok masyarakat;
- 6) Fasilitasi pentas seni di lembaga pendidikan dan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan SPI;
- 8) Penyusunan bahan pantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kesenian;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan lingkup Sejarah dan Kepurbakalaan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang sejarah dan kepurbakalaan;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan;
- 4) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
- 5) Pendaftaran dan inventarisasi budaya tak benda;
- 6) Pembinaan komunitas dan lembaga adat yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan;
- 7) Penyusunan bahan pelestarian sejarah baik di sekolah, di kelompok masyarakat;
- 8) Pemanfaatan benda budaya melalui permuseuman;
- 9) Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
- 10) Pembinaan sejarah lokal masyarakat Port numbay;
- 11) Pengelolaan museum daerah;
- 12) Pelaksanaan SPI;
- 13) Pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, kepurbakalaan, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas**

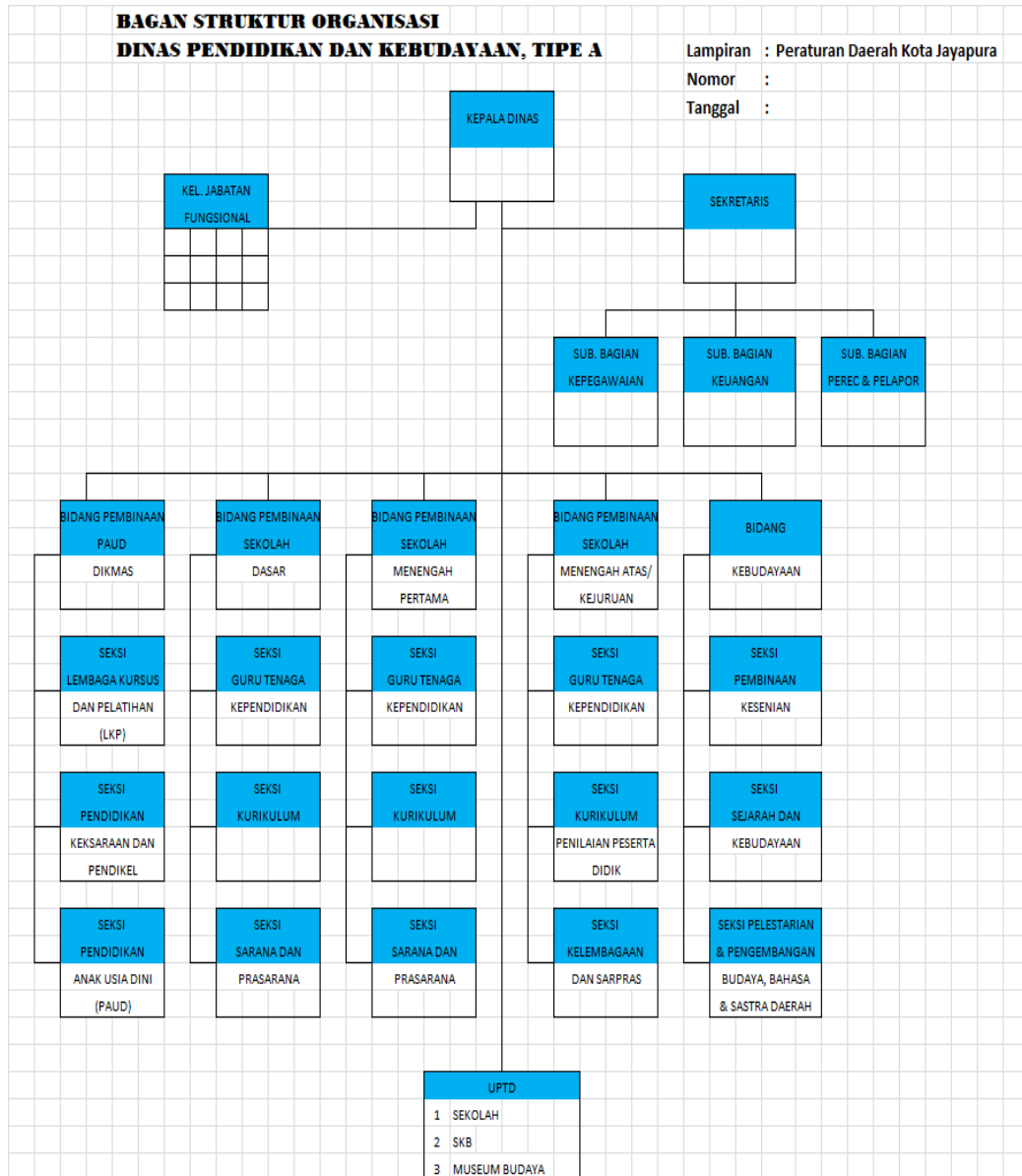
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pengawasan kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar ;
- 2) Melaksanakan pengawasan proses belajar mengajar pendidikan usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar;
- 3) melaksanakan pengawasan administrasi pendidikan usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar ;
- 4) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program di sekolah;
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian akhir sekolah bertaraf nasional/ujian nasional di sekolah;
- 6) Pelaksanaan pengawasan tenaga kependidikan pendidikan usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar;
- 7) Melaksanakan supervisi klinis terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- 8) Mengembangkan, membina dan mengatur pemanfaatan museum seni budaya;
- 9) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Pimpinan

Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, dan 5 (lima) orang Kepala Bidang dengan 15 (lima belas) orang Kepala Seksi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Jayapura



3) Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Jayapura (tidak termasuk guru, pengawas, dan pamong belajar) sampai dengan Bulan Desember 2024 sebanyak : 70 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada : Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagaian Keuangan dan Sub

Bagian Program, Bidang Pendidikan PLS, Bidang Pendidikan DIKDAS dan UPTD SKB (Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal).

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada Tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), sebagaimana yang diuraikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Golongan Tahun 2024

No	Nama Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama			
2	Pembina Utama Muda			
3	Pembina Tk I	IV	b	14
4	Pembina	IV	a	11
5	Penata Tk I	III	d	15
6	Penata	III	c	8
7	Penata Muda Tk I	III	b	10
8	Penata Muda	III	a	12
9	Pengatur Tk I	II	d	1
10	Pengatur Muda Tk I	II	c	5
11	Pengatur	II	b	8
12	Pengatur Muda	II	a	2
			Jumlah	86

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura sebanyak 3.985 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Tenaga Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan								Jumlah
		SMA	SPG / SGO	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	193	-	6	32	16	372	11	-	630
2	SD	182	10	10	26	7	740	27	-	831
3	SKB	3	-	-	-	-	4	1	-	8
4	SMP	126		3	7	30	829	63	-	1.058
5	SMA	49	-	-	19	600	110	-	-	778
6	SMK	53	-	-	18	423	63	-	-	557
7	PKBM	11	-	-	-	-	106	6	-	129
	Total									3.985

Sumber: Data DAPODIKDASMEN Tahun 2024

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan Struktural

Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon I	
2	Eselon II	1 Orang
3	Eselon III	5 Orang
4	Eselon IV	15 Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH INSTANSI

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Instansi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Instansi perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura periode 2023-2026 sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan adalah :
 - a. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah;
 - b. Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
 - c. belum meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
 - d. Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;
 - e. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.
 - f. Pembiayaan operasional sekolah pendidikan belum maksimal penyediaan.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah:
 - a. Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah;

- b. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;
 - c. Belum terpenuhinya kesejahteraan minimal guru;
 - d. Belum meratanya disiplin guru dalam melaksanakan tugas;
 - e. Inovasi dalam perencanaan kurikulum belum merata pada semua sekolah, dan sekolah level bawah cenderung ketidaksiapannya semakin tinggi, sekolah mempersepsikan pelaksanaan BBE/Life Skills sebagai pendekatan tereduksi pada lingkup vokasional;
 - f. Media belajar belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
 - g. Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;
 - h. Kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai media belajar masih lemah/ belum optimal.
 - i. Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram;
 - j. Kolaborasi dalam pembaruan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;
 - k. Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;
 - l. Belum ditetapkan standar mutu yang menjadi indikator pencapaian program;
 - m. Belum terdapat kebijakan untuk menetapkan kendali mutu yang merupakan rencana implementasi kebijakan tingkat nasional;
3. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:
- a. Kurangnya sekolah dalam memwadhahi siswa yang berprestasi;
 - Belum terpenuhinya kemampuan tenaga pendidik dan melaksanakan tugas prosedurnya
 - Belum mengikuti presentasi nilai rata-rata ujian nasional

- b. Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal;
 - c. Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
 - d. Lulusan sekolah kurang memiliki ketrampilan dan kecakapan hidup;
4. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Efisiensi pendidikan adalah:
- a. Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
 - b. Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
 - c. Mutu Pelayanan Administratif bidang kurikulum, sarana pendidikan belum optimum;
 - d. Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah.
 - e. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena :
 - Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
 - Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan;
 - Belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer;
 - f. Kurangnya dukungan dana operasional dan alat transportasi untuk pendataan:
 - Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategik dan program tahunan pada tingkat kota maupun tingkat sekolah belum berkembang baik;
 - Sekolah kurang dapat berfungsi optimal sebagai wahana belajar yang terencana;

- Sistem evaluasi dapat berfungsi sebagai bahan perbaikan belajar-mengajar dan manajemen pelaporan untuk pengembangan data pada tingkat sekolah masih sangat lemah;
- Permasalahan dalam bidang manajemen pendidikan adalah, tidak jelasnya konsep otonomi daerah dibidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, masih tingginya peran pemerintah pusat dalam masalah-masalah teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- Masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel yang bisa dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan;
- Dana-dana pusat (APBN) untuk pengelolaan pendidikan dan pengalokasian seharusnya diberikan sepenuhnya kepada daerah itu sendiri agar pemanfaatannya akan lebih efisien dan efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
- Verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah belum melibatkan seluruh stakeholders sekolah secara transparan, serta belum optimumnya dalam pengelolaan administrasi keuangan sekolah, lebih ditingkatkan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dana yang berasal dari masyarakat;
- Pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu terpantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara efektif;
- Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;

- Standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Instansi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura tahun 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 77 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Pada Pemerintah Kota Jayapura. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2023-2026.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Jayapura dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahunmendatang.

Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesenambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dan menggambarkan yang harus dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting sebagai penentuan arah pelaksanaan tugas yang akan diemban di masa mendatang, yang digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dengan memperhatikan potensi, mempertimbangkan faktor yang ada di organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu kepada Visi Pemerintah Kota Jayapura.

Dalam RPJMD Kota Jayapura Tahun 2023-2026 telah dituangkan visi dan misi. Visi dibuat dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, adapun Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kota Jayapura adalah :

***“TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA BAROMETER PENDIDIKAN
DI PROVINSI PAPUA”***

Visi ini lebih menekankan pada pelayanan pendidikan dan menjadikan Kota Jayapura sebagai tolok ukur dan indikator pendidikan bermutu di Provinsi Papua dengan tidak melupakan keseimbangan dalam pemanfaatan lingkungan.

2. Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dengan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Dengan demikian, jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi akan semakin jelas. Untuk mewujudkan Visi yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura menetapkan 10 (sepuluh) misi untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2023-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Budi Pekerti/Imtaq;
- 2) Meningkatkan Standart Kompetensi Guru;
- 3) Meningkatkan KBM Secara Kurikuler/Ekstrakurikuler;
- 4) Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan;
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Wajar Dikdas 9 Tahun;
- 6) Meningkatkan NUM Kelulusan;
- 7) Meningkatkan Sistem Informasi dan Pendataan;
- 8) Meningkatkan Kerjasama antara DUDI dan Dunia Pendidikan;
- 9) Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan;
- 10) Meningkatkan Pelayanan Prima.

Dari 10 (sepuluh) misi yang ada, Dinas Pendidikan Kota Jayapura sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan misi 2, 3, 4, dan misi 5. Misi ini lebih menekankan pada pelayanan pendidikan untuk semua, yang menjadikan pendidikan bermutu dengan tidak melupakan keseimbangan dalam pemanfaatan lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Jayapura, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan di bidang pendidikan untuk kurun waktu 2023-2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2023-2026.

Dari sisi hasil, misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura menekankan pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan karakter manusia.

Konsep manusia seutuhnya itu meletakkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Potensi yang dikembangkan mencakup tiga aspek paling elementer yaitu :

1. Pertama, aspek afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
2. Kedua, aspek kognitif, yang tercermin pada kapasitas berpikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menguasai teknologi.
3. Ketiga, aspek psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan.

Keselarsan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura 2023-2026 dengan RPJPD Kota Jayapura Tahun 2023-2026 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Keselarasan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura

MISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA 2023-2026	MISI RPJPD 2023-2026
Misi 2: Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu	Misi 5.2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan
Misi 3: Mengembangkan Pendidikan Karakter menuju <i>good</i> <i>governance</i> melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan	Misi 4 : Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat
Misi 4: Meningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang berwawasan lingkungan	

Relevansi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura mengacu pada misi ke 2 mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

b. Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2023-2026.

Penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode lima tahunan merupakan penjabaran dari visi-misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang spesifik dan terukur. Hasil yang dicapai merupakan ukuran tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Jayapura. Oleh karena itu, rumusan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Jayapura Tahun 2023-2026 yaitu :

- Terlaksananya pemerataan, perluasan dan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun diharapkan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) setiap jenjang pendidikan, berkurangnya angka putus sekolah, meningkatnya angka melanjut ke jenjang lebih tinggi serta tuntasnya wajib belajar dasar 9 (sembilan) tahun.
- Terlaksananya peningkatan akses pendidikan menengah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menengah, pendidikan dan tenaga kependidikan pengembangan kurikulum, menurunkan angka putus sekolah menurunnya rata-rata penyelesaian pendidikan dengan menurunnya angka mengulang meningkatnya proporsi siswa SMA/SMK dan yang sederajat serta yang lulus ujian nasional.
- Meningkatkan jumlah rasio guru dan siswa tenaga kependidikan, pemerataan dan peningkatan kemampuannya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran.
- Peningkatan kapasitas lembaga untuk mengembangkan mekanisme tata kelola yang baik, mengembangkan kebijaksanaan meningkatkan partisipasi dan menerapkan sistem pengawasan dan menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan kepada pengelola pendidikan dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisiensi, transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas serta partisipatif.
- Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doctor melalui akademi politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas yang relevan terhadap kebutuhan pasar kerja.

- Peningkatan penduduk mengikuti Pendidikan Non Formal bagi penduduk yang tidak mengikuti Pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup serta tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun serta peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan.

c. Strategis

Strategis dalam mencapai tujuan 1. Mengembangkan pendidikan dasar yang bermutu berkarakter dan berdaya saing, yaitu :

- Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.
- Pengembangan SDM pendidikan dasar.
- Penataan sistem pengelolaan pendidikan dasar.
- Penataan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar.

Strategis dalam mencapai tujuan 2. Mengembangkan pendidikan menengah yang bermutu, berkarakter dan berdaya bersaing, yaitu :

- Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.
- Pengembangan SDM pendidikan menengah.
- Penataan sistem pengelolaan pendidikan menengah.
- Penataan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2023-2026, terdapat 4 sasaran guna mendukung misi Walikota Jayapura 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan program dan kegiatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Belanja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi DPPA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura
Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	350.451.981.017,-
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	161.857.961.155,-
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	850.000.000,-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	200.000.000,-
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	350.000.000,-
TOTAL ANGGARAN		513.709.942.175,-

Terbagi dalam lima Program, delapan belas kegiatan dan seratus dua puluh satu sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 161.857.961.155,- (seratus enam puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah). Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024 :

Tabel 2.6

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA

TAHUN 2024

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
A	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				350,451,981,017
I	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				282,450,000
1		1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	5 Dokumen	167,650,000
2		1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	1 Dokumen	114,800,000
II	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				349,549,331,017
3		1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD; DAK Non Fisik-TPG PNSD, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2100 Orang	349,549,331,017
III	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				279,931,200
4		1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DAU	1 Paket	144,502,200
5		1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DAU	1 Paket	26,400,000
6		1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DAU	1 Paket	34,136,000
7		1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	DAU	1 Dokumen	3,500,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
8		1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DAU	1 Laporan	71,393,000
IV	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17,754,000
9		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DAU		17,754,000
V	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				305,914,800
10		1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DAU	1 Laporan	288,160,800
11		1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DAU	1 Laporan	17,754,000
VI	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16,600,000
12		1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	DAU	5 Unit	16,600,000
B	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
I	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				31,614,279,670.00
1		1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	DAK, DAU, DAK	10 Ruang	814,245,950
2		1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	DAU	4 Unit	400,000,000
3		1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	DAU	6 Ruang	180,000,000
4		1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAU	5 Ruang	110,000,000
5		1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAU	5 Ruang	130,000,000
6		1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	DAK	1 Ruang	453,684,439
7		1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAU	9 Unit	130,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
8		1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAU, DAK	8 Ruang	3,818,138,122
9		1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	DAU, SILPA OTSUS	1 Paket	602,135,000
10		1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	DAK	1 Paket	324,900,000
11		1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	OTSUS-BG	14091 Peserta Didik	7,598,803,217
12		1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Proses Belajar Sekolah Dasar	DAU		170,000,000
13		1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	OTSUS-SG, DAU, SILPA OTSUS	200 Peserta Didik	3,569,212,935
14		1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	DAU	100 Orang	300,000,000
15		1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	DAU	25 Satuan Pendidikan	100,000,000
16		1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	DAK Non Fisik-BOS Reguler, BOS Kinerja	100 Satuan Pendidikan	12,613,160,000
17		1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	100 Orang	100,000,000
18		1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DAU	100 Orang	200,000,000
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				2,843,919,000
19		1.01.02.3.01.41 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Penerima Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	OTSUS - SG, DAU	100 Orang	2,843,919,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
II	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				37,835,679,370
20		1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	DAU	5 Ruang	543,981,763
21		1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	DAU	5 Ruang	240,000,000
22		1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	DAU	2 Ruang	400,000,000
23		1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	DAK, DAU	1 Ruang	972,846,620
24		1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	DAU	2 Ruang	687,500,000
25		1.01.02.2.02.0044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi	DAK, DAU	5 Ruang	669,408,140
26		1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	DAK	6 Ruang	966,621,128
27		1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAK	20 Ruang	11,936,326,008
28		1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	DAK, DAU	6 Ruang	538,938,500
29		1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	DAK	8 Ruang	339,337,140
30		1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Yang Telah Direhabilitasi	DAK	10 Ruang	1,948,348,040
31		1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	DAU	1 Ruang	140,000,000
32		1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	DAU	2 Unit	130,000,000
33		1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAK	5 Unit	1,389,734,424
34		1.01.02.2.02.0035 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	DAK	1 Paket	273,161,000
35		1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	DAU	1 Paket	700,000,000
36		1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	DAU	1 Paket	350,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
37		1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	OTSUS - BG	4943 Peserta Didik	7,224,777,500
38		1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	OTSUS - SG	885 Peserta Didik	200,039,100
39		1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DAU	100 Orang	250,000,000
40		1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	DAU	100 Satuan Pendidikan	100,000,000
41		1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	DAK Non Fisik-BOS Reguler	50 Satuan Pendidikan	7,634,660,000
42		1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DAU	100 Orang	200,000,000
III	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				11,568,843,509
43		1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Yang Terbangun	DAK, DAU, SILPA OTSUS, SILPA DAK	4 Unit	2,933,058,502
44		1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	DAU	6 Unit	216,000,000
45		1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	DAU	10 Ruang	480,000,000
46		1.01.02.2.03.0033 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	DAU	1 Ruang	480,000,000
47		1.01.02.2.03.0036 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAU	1 Ruang	330,000,000
48		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	DAU	1 Paket	950,000,000
49		1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	OTSUS - SG	2158 Siswa	700,000,000
50		1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	DAK, DAU	15 Paket	502,795,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
51		1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DAU	200 Orang	350,000,000
52		1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		100 Sekolah	1,050,000,000
53		1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	DAK Non Fisik	100 Sekolah	3,576,990,000
IV	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3,127,300,000.00
54		1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DAU	18 Satuan Pendidikan	1,000,000,000
55		1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		200 Satuan Pendidikan	2,127,300,000
V	1.01.02.3.05	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				35,923,151,998
56		1.01.02.3.05.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	DAK, DAU	13 Ruang	2,136,693,634
57		1.01.02.3.05.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika Yang Terbangun	DAK, DAU	5 Ruang	1,503,711,335
58		1.01.02.3.05.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia Yang Telah Terbangun	DAU	2 Ruang	451,040,000
59		1.01.02.3.05.0008 - Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa Yang Terbangun	DAK, DAU	3 Ruang	1,284,711,887
60		1.01.02.3.05.0007 - Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer Yang Terbangun	DAU	5 Ruang	698,960,000
61		1.01.02.3.05.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang Telah Terbangun	DAU	3 Ruang	150,000,000
62		1.01.02.3.05.0011 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Terbangun	DAU	5 Ruang	750,000,000
63		1.01.02.3.05.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula Yang Telah Terbangun	DAU	1 Unit	1,500,000,000
64		1.01.02.3.05.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	DAK, DAU	3 Unit	2,011,629,462
65		1.01.02.3.05.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAK	25 Ruang	2,459,492,332

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
66		1.01.02.3.05.0020 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	DAK, DAU	9 Ruang	905,328,168
67		1.01.02.3.05.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	DAK	5 Ruang	923,139,468
68		1.01.02.3.05.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi	DAK, DAU	5 Ruang	610,569,734
69		1.01.02.3.05.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi	DAK, DAU	5 Ruang	960,569,734
70		1.01.02.3.05.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi	DAK, DAU	5 Ruang	1,189,940,178
71		1.01.02.3.05.0026 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi	DAU	5 Ruang	600,000,000
72		1.01.02.3.05.0029 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	DAU	5 Ruang	500,000,000
73		1.01.02.3.05.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	DAK, DAU	4 Ruang	720,475,068
74		1.01.02.3.05.36 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	DAU, DAK, SILPA OTSUS	1 Paket	868,690,984
75		1.01.02.3.05.46 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	DAK, DAU	1 Paket	705,110,000
76		1.01.02.3.05.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	OTSUS - SG	4895 Peserta Didik	3,700,850,000
77		1.01.02.3.05.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	DAU	100 Satuan Pendidikan	992,000,000
78		1.01.02.3.05.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	DAU, OTSUS	885 Peserta Didik	1,000,000,000
79		1.01.02.3.05.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DAU	100 Orang	300,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
80		1.01.02.3.05.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DAU	500 Satuan Pendidikan	100,000,000
81		1.01.02.3.05.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	DAK Non Fisik	Sekolah	8,489,440,000
82		1.01.02.3.05.0062 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	DAU	Orang	410,800,000
VI		Penyediaan Pendidikan Layanan Khusus Bagi OAP				14,808,858,000
83		1.01.02.3.07.0003 - Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	OTSUS - SG	15 Siswa	7,147,385,200
84		1.01.02.3.07.0004 - Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	OTSUS - SG	23 Peserta Didik	7,661,472,800.00
VII	1.01.02.3.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				24,135,929,608
85		1.01.02.3.06.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Terbangun	DAK, DAU	3 Unit	1,580,597,489
86		1.01.02.3.06.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa Yang Telah Terbangun	DAU	3 Ruang	810,000,000
87		1.01.02.3.06.05 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Terbangun	DAK	6 Ruang	5,552,399,452
88		1.01.02.3.06.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang Telah Terbangun	DAK	10 Ruang	721,277,640
89		1.01.02.3.06.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	DAK, DAU	2 Unit	1,530,892,060
90		1.01.02.3.06.0017 - Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Sarana, Ruang Praktik Siswa Yang Telah Direhabilitasi	DAU	4 Ruang	500,000,000
91		1.01.02.3.06.0018 - Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Direhabilitasi	DAK	4 Ruang	500,000,000
92		1.01.02.3.06.0020 - Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	DAU	1 Unit	500,000,000
93		1.01.02.3.06.0021 - Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAU	4 Ruang	500,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
94		1.01.02.3.06.0023 - Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAU	5 Unit	500,000,000
95		1.01.02.3.06.0024 - Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir Yang Telah Direhabilitasi	DAU	5 Unit	500,000,000
96		1.01.02.3.06.0025 - Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	DAU	5 Unit	700,000,000
97		1.01.02.3.06.0044 - Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi Yang Telah Terbangun	DAU	2 Unit	420,000,000
98		1.01.02.3.06.38 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	DAK, DAU	1 Paket	2,219,371,360
99		1.01.02.3.06.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	OTSUS -SG	2868 Peserta Didik	2,299,150,000
100		1.01.02.3.06.0039 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	DAU	50 Satuan Pendidikan	400,000,000
101		1.01.02.3.06.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	OTSUS, DAU	300 Peserta Didik	800,000,000
102		1.01.02.3.06.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DAU	200 Orang	270,000,000
103		1.01.02.3.06.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DAU	50 Satuan Pendidikan	807,781,600
104		1.01.02.3.06.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	DAK Non Fisik	50 Satuan Pendidikan	3,024,460,000
C	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				850,000,000
XIV	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				850,000,000
1		1.01.06.2.01.01 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	OTSUS	50 Kamus	200,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
2		1.01.06.2.01.03 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	4 Publikasi	200,000,000
3		1.01.06.2.01.05 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	OTSUS	100 Buku	200,000,000
4		1.01.06.2.01.06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	100 Siswa	250,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
D	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				200,000,000
XV	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah				200,000,000
1		2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peserta Yang Menerima Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	OTSUS		200,000,000
E	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				350,000,000
XVI	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				350,000,000
1		2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikembangkan	DAU		350,000,000
TOTAL ANGGARAN						513,709,942,172

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah

Penetapan kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dengan Walikota Jayapura Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7

PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Indeks Pendidikan	Skala		
1	Tersedianya dan terjangkaunya akses pendidikan bagi anak usia dini sekolah secara berkeadilan	Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
		Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	%	38,00	Jumlah peserta didik PAUD : Jumlah penduduk usia 4-6 tahun x 100 %
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	86,00	Jumlah siswa SD/MI/SDLB/Paket A : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	96,00	Jumlah siswa SMP/MTs/SMPLB/Paket B : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MTs/Paket C	%	71,00	Jumlah siswa SMA/SMK/MTs/Paket C : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun x 100 %
		Angka Partisipasi Murni (APM) :			
		Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun Formal (SD/MI/SDLB/Paket A)	%	78,00	Jumlah siswa SD/MI usia 7-12 th : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %
		Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/SMPLB/Paket B)	%	70,05	Jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15 th : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %
		Angka Partisipasi Murni Usia 16-18 Tahun (SMA/SMK/MTs/Paket C)	%	49,71	Jumlah siswa SMP/MTs usia 16-18 th : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun x 100 %
2	Tersedianya dan terjangkaunya akses pendidikan bagi remaja dan orang dewasa putus sekolah	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,70	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca : jumlah penduduk usia diatas 15 tahun x 100%
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	12,00	Kombinasi Antara Partisipasi Sekolah, Jenjang Pendidikan Yang Sedang Dijalani, Kelas Yang Diduduki,
3	Tersedianya layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan	Cakupan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan :			
		Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD	%	90,00	Jumlah Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang PAUD : Jumlah sekolah x 100%
		Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang SD	%	90,00	Jumlah Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SD : Jumlah sekolah x 100%
		Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang SMP	%	90,00	Jumlah Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMP : Jumlah sekolah x 100%
		Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang SMA/SMK	%	90,00	Jumlah Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMA/SMK : Jumlah sekolah x 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Prosentase Sekolah yang mencapai SPM :			
		Prosentase PAUD Formal yang mencapai SPM	%	100,00	Jumlah peserta didik PAUD Formal yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan : Jumlah penduduk usia 4-6 tahun x 100 %
		Prosentase Sekolah Dasar yang mencapai SPM	%	100,00	Jumlah peserta didik SD/MI dan SD/MTs yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %
		Prosentase SMP yang mencapai SPM	%	100,00	Jumlah peserta didik SMP/MI dan SMP/MTs yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %
		Prosentase SMA/SMK yang mencapai SPM	%	100,00	Jumlah peserta didik SMA/SMK/MI dan SMA/SMK/MTs yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun x 100 %
		Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi :			
		Prosentase satuan PNF yang terakreditasi	%	95,00	Jumlah Sekolah PNF Yang Terakreditasi : Jumlah Sekolah PNF x 100%
		Prosentase satuan SD yang terakreditasi	%	100,00	Jumlah Sekolah SD Yang Terakreditasi : Jumlah Sekolah SD x 100%
		Prosentase satuan SMP yang terakreditasi	%	100,00	Jumlah Sekolah SMP Yang Terakreditasi : Jumlah Sekolah SMP x 100%
		Prosentase satuan SMA/SMK yang terakreditasi	%	100,00	Jumlah Sekolah SMA/SMK Yang Terakreditasi : Jumlah Sekolah SMA/SMK x 100%
		Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata)	Sekolah	60	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Adiwiyata
4	Meningkatnya efektifitas dan relevansi layanan pendidikan	Angka Putus Sekolah :			
		Angka Putus Sekolah SD	%	0,00	Jumlah Siswa SD/MI Yang Putus Sekolah : Jumlah Siswa SD/MI x 100%
		Angka Putus Sekolah SMP	%	0,00	Jumlah Siswa SMP/Mts Yang Putus Sekolah : Jumlah Siswa SMP/Mts x 100%
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,00	Jumlah Siswa SMA/SMK/Mts Yang Putus Sekolah : Jumlah Siswa SMA/SMK/Mts x 100%
		Angka Kelulusan :			
		Angka Kelulusan Paket A	%	100,00	Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Kelas Akhir x 100%
		Angka Kelulusan Paket B	%	100,00	Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Kelas Akhir x 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Angka Kelulusan Paket C	%	100,00	Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Kelas Akhir x 100%
		Angka Kelulusan SD	%	100,00	Jumlah Siswa SD/MI Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa SD/MI Kelas Terakhir x 100%
		Angka Kelulusan SMP	%	100,00	Jumlah Siswa SMP/Mts Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa SMP/Mts Kelas Terakhir x 100%
		Angka Kelulusan SMA/SMK	%	100,00	Jumlah Siswa SMA/SMK Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa SMP/Mts Kelas Terakhir x 100%
		Angka Partisipasi Sekolah :			
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang tidak bersekolah	%	0,00	Jumlah Usia 5-6 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 5-6 Tahun yang bersekolah x 100%
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang tidak bersekolah	%	0,00	Jumlah Usia 7-15 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 7-15 Tahun yang bersekolah x 100%
		Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang tidak bersekolah	%	0,00	Jumlah Usia 16-18 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 16-18 Tahun yang bersekolah x 100%
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun disabilitas yang tidak bersekolah	%	0,00	Jumlah Usia 4-18 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 4-18 Tahun yang bersekolah x 100%
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah	%	0,00	Jumlah Usia 7-18 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 7-18 Tahun yang bersekolah x 100%
		Kemampuan Literasi			
		Rata-rata Kemampuan Literasi SD	Nilai	56,48	Sumber Data : Raport Pendidikan
		Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB	Nilai	65,96	
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMP	Nilai	66,14	
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLB	Nilai	69,70	
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMA	Nilai	64,83	
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMALB	Nilai	62,84	
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK	Nilai	64,18	
		Kemampuan Numerasi			
		Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	Nilai	41,72	Sumber Data : Raport Pendidikan
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB	Nilai	53,61	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP	Nilai	56,78	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB	Nilai	61,79	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA	Nilai	54,56	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMALB	Nilai	56,31	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	Nilai	54,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Pendidikan Anak Usia Dini			
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD	%	62,13	Jumlah PAUD Berakreditasi : jumlah PAUD x 100
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal	%	61,87	Jumlah Guru PAUD kualifikasi S1/DIV : jumlah guru x 100
		Iklm Keamanan :			
		Iklm Keamanan SD	Nilai	88,61	Sumber Data : Raport Pendidikan
		Iklm Keamanan SDLB	Nilai	87,77	
		Iklm Keamanan SMP	Nilai	83,55	
		Iklm Keamanan SMPLB	Nilai	85,73	
		Iklm Keamanan SMA	Nilai	84,78	
		Iklm Keamanan SMALB	Nilai	84,25	
		Iklm Keamanan SMK	Nilai	85,31	
		Iklm Kebinekaan :			
		Iklm Kebinekaan SD	Nilai	89,75	Sumber Data : Raport Pendidikan
		Iklm Kebinekaan SDLB	Nilai	92,39	
		Iklm Kebinekaan SMP	Nilai	79,53	
		Iklm Kebinekaan SMPLB	Nilai	80,36	
		Iklm Kebinekaan SMA	Nilai	85,33	
		Iklm Kebinekaan SMALB	Nilai	78,51	
		Iklm Kebinekaan SMK	Nilai	86,67	
		Iklm Inklusivitas :			
		Iklm Inklusivitas SD	Nilai	79,49	Sumber Data : Raport Pendidikan
		Iklm Inklusivitas SDLB	Nilai	83,58	
		Iklm Inklusivitas SMP	Nilai	79,46	
		Iklm Inklusivitas SMPLB	Nilai	86,48	
		Iklm Inklusivitas SMA	Nilai	81,55	
		Iklm Inklusivitas SMALB	Nilai	85,98	
		Iklm Inklusivitas SMK	Nilai	80,82	
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah :			
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SD	Nilai	75,00	Jumlah Hasil Nilai Dari Semua Mata Pelajaran Yang Ada Di Ujian Nasional : Dengan Jumlah Mata Pelajaran
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP	Nilai	78,00	Jumlah Hasil Nilai Dari Semua Mata Pelajara Yang Ada Di Ujian Nasional : Dengan Jumlah Mata Pelajaran
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA	Nilai	78,00	Jumlah Hasil Nilai Dari Semua Mata Pelajara Yang Ada Di Ujian Nasional : Dengan Jumlah Mata Pelajaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Angka Melanjutkan :			
		Angka Melanjutkan Siswa SD (Ke SMP)	%	100,00	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs : Jumlah lulusan pd jenjang SMP/ MTs tahun ajaran sebelumnya x 100%
		Angka Melanjutkan Siswa SMP (Ke SMA/SMK)	%	100,00	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MTs : Jumlah lulusan pada jenjang sma/smk/ MTs tahun ajaran sebelumnya x 100%
5	Tersedianya lulusan pendidikan kejuruan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan			
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	90,00	Jumlah Siswa SMK : Jumlah Siswa SMK Yang Lulus x 100%
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya	%	79,00	
6	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	Prosentase Tenaga Pendidik yang memenuhi Standar Nasional :			
		Prosentase Guru PAUD Formal yang memiliki kualitas S-1	%	100,00	Jumlah guru PAUD Formal berijazah kualifikasi S1 : Jumlah Guru guru PAUD Formal x 100%
		Prosentase Guru SD yang memiliki kualitas S-1	%	85,00	Jumlah guru SD berijazah kualifikasi S1 : Jumlah Guru guru SD x 100%
		Prosentase Guru SMP yang memiliki kualitas S-2	%	83,00	Jumlah guru SMP berijazah kualifikasi S2 : Jumlah Guru guru SMP x 100%
		Prosentase Guru SMA/SMK yang memiliki kualitas S-2	%	80,00	Jumlah guru SMA/SMK berijazah kualifikasi S2 : Jumlah Guru guru SMA/SMK x 100%
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SD	%	95,00	Jumlah guru SD Yang Mengikuti Uji Kompetensi : Jumlah Guru Guru SD x 100%
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMP	%	60,00	Jumlah guru SMP Yang Mengikuti Uji Kompetensi : Jumlah Guru Guru SMP x 100%
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMA/SMK	%	60,00	Jumlah guru SMA/SMK Yang Mengikuti Uji Kompetensi : Jumlah Guru u SMA/SMK x 100%
7	Terselenggaranya pendidikan kebudayaan diseluruh jenjang pendidikan	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya lokal :			
		Kurikulum Lokal	Sekolah		Jumlah Sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal berdasarkan potensi daerah : jumlah Sekolah x 100%
8	Meningkatnya perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya	Cakupan gelar seni dan budaya :			
		Prosentase cerita Rakyat bahasa port numbay	%	100,00	Jumlah Cerita Rakyat bahasa port numbay yang dikembangkan : jumlah seluruh Cerita Rakyat bahasa port numbay lokal x 100%
		Prosentase pelestarian bahasa port numbay	%	100,00	Jumlah pelestarian bahasa port numbay yang dikembangkan : jumlah bahasa port numbay x 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
9	Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima	Prosentasi temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti :	%	85,00	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,00	Menghitung Jumlah Sampel Responden Yang Akan Disurvey Menggunakan Perhitungan Sample
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B+ (72,75)	Nilai Reviuw Inspektorat
10	Tersedianya SDM yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima dan efisiensi	Prosentase pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi :			
		Prosentase pegawai yang memenuhi standar minimal S-1	%	85,00	Jumlah Pegawai : Jumlah Pegawai Yang S-1 x 100%
		Prosentase pegawai yang memperoleh diklat teknis fungsional	%	35,00	Jumlah Pegawai : jumlah pegawai yang memperoleh diklat teknis fungsional x 100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja/tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan.
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

No	% Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	91% - 100%	Sangat Baik
2	76% - 90%	Baik
3	66% - 75%	Cukup
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Piranti pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura menggunakan suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja berisikan sasaran, indikator sasaran, target, realisasi dan persentase

pencapaian.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, yang menyajikan target tahun 2024 dan realisasi indikator sasaran tahun 2024. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Indeks Pendidikan			
1.	Tersedianya dan Terjangkaunya Akses Pendidikan Bagi Anak Usia Dini Sekolah Secara Berkeadilan	Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
		Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	85,00 %	80,62%	94,85%
		Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal	85,00%	88,23%	103,8
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	86,00	102,66	119.37
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B	96,00	98,70	102.81
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MTs/Paket C	71,00	119,10	167.75
		Angka Partisipasi Murni (APM) :			
		Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun SD / MI / SDLB / Paket A	78,00	80,38	103.05
		Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun SMP / MTs / SMPLB / Paket B	70,05	57,93	82.70
		Angka Partisipasi Murni Usia 15-18 Tahun SMA/SMK/MTs/Paket C	49,71	44,41	89.34
2.	Tersedianya dan Terjangkaunya Akses Pendidikan Bagi Remaja Dan Orang Dewasa Putus Sekolah	Angka Melek Huruf (AMH)	99,70	99,54	99.84
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	%	%	%
3.	Tersedianya Layanan Pendidikan Sekolah Yang Bermutu Dan Berwawasan Lingkungan	Cakupan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan:			
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang PAUD	90,00	97,75	108.61
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SD	90,00	85,00	94.44
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMP	90,00	83,51	92.79
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMA/SMK	90.00		
		Prosentase Sekolah Yang Mencapai SPM :			

		Prosentase PAUD Formal Yang Mencapai SPM	100		
		Prosentase Sekolah Dasar Yang Mencapai SPM	100,00	95,00	95.00
		Prosentase SMP Yang Mencapai SPM	100,00	83,51	83.51
		Prosentase SMA/SMK Yang Mencapai SPM	100		
		Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi :			
		Prosentase Satuan PNF Yang Terakreditasi	95,00		
		Prosentase Satuan SD Yang Terakreditasi	100,00	100,00	100.00
		Prosentase Satuan SMP Yang Terakreditasi	100,00	90,34	90.34
		Prosentase Satuan SMA/SMK Yang Terakreditasi	100,00		
4.	Meningkatnya Efektifitas Dan Relevansi Layanan Pendidikan	Angka Putus Sekolah :			
		Angka Putus Sekolah SD	0,00	0,001	
		Angka Putus Sekolah SMP	0,00	1,55	
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,00	0,00	
		Angka Kelulusan :			
		Angka Kelulusan Paket A	100%	100%	100%
		Angka Kelulusan Paket B	100%	100%	100%
		Angka Kelulusan Paket C	100%	100%	100%
		Angka Kelulusan SD	100%	100%	100%
		Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100%
		Angka Kelulusan SMA/SMK	100%	100%	100%
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah :			
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SD	75,00	78,00	104,00%
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP	78,00	78,00	100,00%
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA/SMK	78,00		
		Angka Melanjutkan :			
		Angka Melanjutkan Siswa SD	100%	100%	100%
		Angka Melanjutkan Siswa SMP	100%	100%	100%
		Angka Melanjutkan Siswa SMA/SMK	100%	100%	100%
5	Tersedianya lulusan pendidikan kejuruan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	Prosentase Lulusan Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup yang bekerja dan berwirausaha	100%		

6	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	Prosentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Standar Nasional :			
		Prosentase Guru PAUD Formal yang memiliki kualitas S-1	100,00		
		Prosentase Guru SD yang memiliki kualitas S-1	85,00	96,00	112.94
		Prosentase Guru SMP yang memiliki kualitas S-2	83,00	4,99	6.01
		Prosentase Guru SMA/SMK yang memiliki kualitas S-2	80,00		
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SD	95,00	90,00	94,74%
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMP	60,00	97,00	161.67%
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMA/SMK	60,00		
7.	Terselenggaranya pendidikan kebudayaan diseluruh jenjang pendidikan	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Berbasis Budaya Lokal	Nilai		
		Kurikulum Lokal	100		
8.	Meningkatnya perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya	Cakupan Gelar Seni Dan Budaya			
		Prosentase Cerita Rakyat Bahasa Port Numbay	100%	100%	100%
		Prosentase Pelestarian Bahasa Port Numbay	100%	100%	100%
9.	Tersedianya Sistem Tata Kelola Yang Handal Dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima	Prosentasi Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	85%	85%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77,00	78,00	101.30
		Nilai Evaluasi AKIP	B+ (72,52)	B+ (73,42)	98,77
10	Tersedianya SDM Yang Handal Dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Dan Efisiensi	Prosentase Pegawai Yang Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Dan Kompetensi :			
		Prosentase Pegawai Yang Memenuhi Standar Minimal S-1	90%	81,18%	97,13%
		Prosentase Pegawai Yang Memperoleh Diklat Teknis Fungsional	35		

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan SKPD yaitu dalam RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Kemudian dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Secara nasional maupun SPM tidak norma ideal yang baku terhadap indikator kinerja ini, jika di suatu wilayah/kabupaten rasio antara jumlah sekolah dan siswa semakin berkurang berarti kebutuhan akan pendirian sekolah baru telah terpenuhi, dalam hal ini terlihat di Kota Jayapura dimana jumlah lembaga pendidikan saat ini 137 PAUD, 108 SD, 39 SMP, 25 SMA dan 19 SMK.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kota Jayapura periode 2023 - 2026 di uraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN <i>6=4/5*100</i>
			2023	2024	
1	2	3	4	5	
1.	Tersedianya dan Terjangkaunya Akses Pendidikan Bagi Anak Usia Dini Sekolah Secara Berkeadilan	Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
		Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	80,62%		
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	93,22	102,66	110,13
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B	94,37	98,70	104,53
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MTs/Paket C	95,86	119,10	124,24
		Angka Partisipasi Murni (APM) :			
		Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun SD/MI/SDLB/Paket A	85,18	80,38	94,36
		Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/SMPLB/Paket B)	87,05	57,93	66,55
		Angka Partisipasi Murni Usia 16-18 Tahun SMA/SMK/MTs/Paket C			
2.	Tersedianya dan Terjangkaunya Akses Pendidikan Bagi Remaja Dan Orang Dewasa Putus Sekolah	Angka Melek Huruf (AMH)			
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,32%	11,84	114,73
3.	Tersedianya Layanan Pendidikan Sekolah Yang Bermutu Dan Berwawasan Lingkungan	Cakupan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan:			
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang PAUD	80,00%	97,75	122,73
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SD	95,70%	85,00	93,73

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN
			2022	2023	
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMP	87.42%	100%	87,42%
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMA/SMK		100%	
Prosentase Sekolah Yang Mencapai SPM :					
		Prosentase PAUD Formal Yang Mencapai SPM	78,65		
		Prosentase Sekolah Dasar Yang Mencapai SPM	81,00	95,00	117,28
		Prosentase SMP Yang Mencapai SPM	72,00	83,51	115,99
		Prosentase SMA/SMK Yang Mencapai SPM	100		
Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi :					
		Prosentase Satuan PNF Yang Terakreditasi	85,00		
		Prosentase Satuan SD Yang Terakreditasi	96,94	100	103,16
		Prosentase Satuan SMP Yang Terakreditasi	94,87	90,34	95,23
		Prosentase Satuan SMA/SMK Yang Terakreditasi	97,44		
Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata)					
4.	Meningkatnya Efektifitas Dan Relevansi Layanan Pendidikan	Angka Putus Sekolah :			
		Angka Putus Sekolah SD	0,00	0,001	
		Angka Putus Sekolah SMP	0,00	1,55	
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,00	0,00	
Angka Kelulusan :					
		Angka Kelulusan Paket A	100%	100%	100%
		Angka Kelulusan Paket B	100%	100%	100%
		Angka Kelulusan Paket C	100%	100%	100%

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN
			2022	2023	
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
		Angka Kelulusan SD	100	100	100%
		Angka Kelulusan SMP	100	100	100%
		Angka Kelulusan SMA/SMK	100	100	
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah :			
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SD	73,00	100	136,99
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP	76,30	100	131,06
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA/SMK	76,45	100	130,80
		Angka Melanjutkan :			
		Angka Melanjutkan Siswa SD	100	100	100
		Angka Melanjutkan Siswa SMP	100	100	100
		Angka Melanjutkan Siswa SMA/SMK	100	100	100
5.	Tersedianya Lulusan Pendidikan Kejuruan Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Lapangan Kerja	Prosentase Lulusan Kursus Dan Pendidikan Kecakapan Hidup Yang Bekerja Dan Berwirausaha			
6.	Tersedianya Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Bermutu	Prosentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Standar Nasional :			
		Prosentase Guru PAUD Formal Yang Memiliki Kualitas S-1	65,22		
		Prosentase Guru SD Yang Memiliki Kualitas S-1	87,51	96,00	109,70
		Prosentase Guru SMP Yang Memiliki Kualitas S-2	93,39	4,99	5,34
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SD		90,00	
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMP		97,00	
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMA			
7.	Terselenggaranya Pendidikan Kebudayaan Diseluruh Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Berbasis Budaya Lokal			
		Kurikulum Lokal			

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6=4/5*100
8.	Meningkatnya Perlindungan, Pemanfaatan Dan Pengembangan Budaya	Cakupan Gelar Seni Dan Budaya			
		Prosentase Cerita Rakyat Bahasa Port Numbay	100	100	100
		Prosentase Pelestarian Bahasa Port Numbay	100	100	100
9.	Tersedianya Sistem Tata Kelola Yang Handal Dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima	Prosentasi Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti			
		Indeks Kepuasan Masyarakat			
		Nilai Evaluasi AKIP	B+(72,75)	B+ (73,42)	100,92
10.	Tersedianya SDM Yang Handal Dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Dan Efisiensi	Prosentase Pegawai Yang Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Dan Kompetensi :			
		Prosentase Pegawai Yang Memenuhi Standar Minimal S-1	81,18	82,56	101,70
		Prosentase Pegawai Yang Memperoleh Diklat Teknis Fungsional			

Uraian penjelasan tabel diatas perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura periode 2023-2026 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 48 indikator kinerjanya mengalami kemajuan dengan komitmen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura untuk selalu meningkatkan pelayanan dalam Pendidikan. Tentunya ini adalah hal yang positif, namun demikian upaya untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan menjadi hal prioritas yang harus terus dilakukan. Penentu keberhasilan atas capaian ini juga karena adanya dukungan dari masyarakat berupa :

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kemampuan baca, tulis dan berhitung.
2. Komitmen dari Dinas Pendidikan untuk terus menerus menggalakkan gerakan Jam Belajar Masyarakat.
3. Kesadaran dari lembaga pendidikan non formal dan informal untuk memperbaiki manajemen lembaganya

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada tahun anggaran 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2023 Anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2023.

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing program/kegiatan/subkegiatan ditunjukkan seperti pada dalam Tabel sebagai berikut

Tabel 3.4

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)	
				FISIK	KEU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	510.154.226.590	488.888.907.587	100	95,83
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	350.451.981.017	335.801.869.929	100	95,82
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.450.000	273.637.210	100	96,88
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.650.000	158.837.210	100	94,74
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	114.800.000	114.800.000	100	100
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	349.549.331.017	334.914.111.257	100	96
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	349.549.331.017	334.914.111.257	100	95,81
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.931.200	279.429.200	100	99,82
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.502.200	144.500.200	100	100
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.400.000	26.400.000	100	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.136.000	34.136.000	100	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.000.000	100	85,71
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.393.000	71.393.000	100	100
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.754.000	17.754.000	100	100
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.754.000	17.754.000	100	100
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.914.800	304.102.649	100	99,41
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.754.000	15.941.849	100	89,79
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.160.800	288.160.800	100	100

VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.600.000	12.835.613	100	77,32
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.600.000	12.835.613	100	77,32
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	158.852.245.573	152.240.772.158	100	95,84
I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.703.189.763	31.031.434.134	100	108,11
1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	773.532.511	787.700.500	100	101,83
		434.100.000	451.575.000	100	104,03
		316.728.000	336.125.500	100	106,12
		22.704.511	-	-	-
2	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	360.320.000	399.346.000	100	110,83
		360.320.000			
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	155.842.000	178.395.000	100	114,47
		155.842.000			
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	90.620.000	109.687.450	100	121,04
		90.620.000			
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	108.500.000	129.780.000	100	119,61
		108.500.000			
6	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	425.000.000	451.487.948	100	106,23
		425.000.000			
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	109.003.000	48.169.000		44,19
		109.003.000			

8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.671.597.000	3.660.350.247	100	99,69
		281.190.000	281.350.012	100	100,06
		3.390.407.000	3.379.000.235	100	99,66
		2.350.716.360			
9	Pengadaan Mebel Sekolah	602.135.000	598.990.000	100	99,48
		500.000.000	499.040.000	100	99,81
		102.135.000	99.950.000	100	97,86
10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	299.925.000	324.600.000	100	108,23
11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.598.803.217	7.514.542.096	100	98,89
12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	170.000.000	169.500.000	100	99,71
13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.024.752.035	3.541.823.139	100	345,63
		2.244.460.900	2.237.044.004	100	99,67
		300.000.000	290.241.510	100	96,75
		- 1.519.708.865	1.014.537.625	100	- 66,76
14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300.000.000	300.000.000	100	100
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	100.000.000	100	100
16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12.613.160.000	12.420.744.877	100	98,47
17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.000.000	99.903.400	100	100
18	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200.000.000	196.414.477	100	98,21

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.843.919.000	2.843.919.000	100	100
19	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	2.843.919.000	2.843.919.000	100	100
		2.593.919.000	2.593.919.000	100	100
		250.000.000	250.000.000	100	100
II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	37.741.053.723	36.910.546.537	100	97,80
20	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	543.981.763	541.826.000	100	99,60
21	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	211.520.000	238.568.000	100	112,79
22	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	400.000.000	398.328.204	100	99,58
23	Pembangunan Laboratorium	972.846.620	971.798.946	100	99,89
		719.096.620	718.440.446	100	99,91
		253.750.000	253.358.500	100	99,85
24	Pembangunan Ruang kelas baru	687.500.000	684.706.830	100	99,59
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	641.840.000	663.927.740	100	103,44
		244.155.000	257.870.000	100	105,62
		397.685.000	406.057.740	100	102,11
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang guru/Kepala Sekolah/TU	966.621.128	961.624.430	100	99,48
27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.936.326.008	11.418.430.136	100	95,66

28	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	538.938.500	535.395.920	100	99,34
		138.938.500	137.788.000	100	99,17
		400.000.000	397.607.920	100	99,40
29	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	339.337.140	337.227.000	100	99,38
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.948.348.040	1.925.632.160	100	98,83
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	140.000.000	138.681.000	100	99,06
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	130.000.000	128.405.000	100	98,77
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.389.734.424	1.382.953.236	100	99,51
34	Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa	273.161.000	272.961.000	100	99,93
35	Pengadaan Mebel Sekolah	700.000.000	699.325.000	100	99,90
36	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	350.000.000	349.920.000	100	99,98
37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.186.200.000	7.191.427.500	100	100,07
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.039.100	199.979.100	100	99,97
39	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	250.000.000	250.000.000	100	100
40	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	100.000.000	100	100
41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.634.660.000	7.319.429.335	100	95,87
42	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200.000.000	200.000.000	100	100

III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.568.843.502	11.226.993.383	100	97,05
43	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.933.058.502	2.701.743.391	100	92,11
		206.423.000	157.152.910	100	76,13
		2.476.564.000	2.295.085.481	100	92,67
		250.000.000	249.505.000	100	99,80
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	216.000.000	214.144.000	100	99,14
45	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	480.000.000	478.682.992	100	99,73
46	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	480.000.000	476.076.000	100	99,18
47	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	330.000.000	327.240.000	100	99,16
48	Pengadaan Mebel PAUD	950.000.000	948.540.000	100	99,85
49	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	700.000.000	694.638.000	100	99,23
50	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	502.795.000	498.853.000	100	99,22
		102.795.000	102.575.000	100	99,79
		400.000.000	396.278.000	100	99,07
51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	350.000.000	349.400.000	100	99,83
52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.050.000.000	1.050.000.000	100	100
53	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.576.990.000	3.487.676.000	100	97,50

IV	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.127.300.000	2.956.858.000	100	94,55
54	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.000.000.000	1.000.000.000	100	100
55	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.127.300.000	1.956.858.000	100	91,99
V	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	35.923.151.984	33.274.000.935	100	92,63
56	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.136.693.634	2.120.733.000	100	99,25
		1.300.000.000	1.294.578.000	100	99,58
		836.693.634	826.155.000	100	98,74
57	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	1.503.711.335	1.495.561.911	100	99,46
		753.711.335	749.285.911	100	99,41
		750.000.000	746.276.000	100	99,50
58	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	451.040.000	450.447.000	100	99,87
59	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	1.284.711.887	1.274.789.465	100	99,23
		1.260.161.887	1.250.266.465	100	99,21
		24.550.000	24.523.000	100	99,89
60	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	698.960.000	696.454.000	100	99,64
61	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150.000.000	149.640.000	100	99,76
62	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	750.000.000	747.683.000	100	99,69
63	Pembangunan Ruang serba Guna/Aula	1.500.000.000	1.236.246.674	100	82,42

64	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.011.629.462	1.996.996.000	100	99,27
		511.629.462	505.054.000	100	98,71
		1.500.000.000	1.491.942.000	100	99,46
65	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.459.492.332	2.355.457.794	100	95,77
66	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	905.328.168	897.782.600	100	99,17
		755.328.168	750.042.600	100	99,30
		150.000.000	147.740.000	100	98,49
67	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Laboratorium Biologi	923.139.468	916.061.722	100	99,23
68	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Laboratorium Fisika	610.569.734	605.021.000	100	99,09
		150.000.000	147.838.000	100	98,56
		460.569.734	457.183.000	100	99,26
69	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Laboratorium Kimia	960.569.734	957.446.110	100	99,67
		460.569.734	459.144.200	100	99,69
		500.000.000	498.301.910	100	99,66
70	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Laboratorium Komputer	1.189.940.178	1.177.518.000	100	98,96
		789.940.178	785.080.000	100	99,38
		400.000.000	392.438.000	100	98,11
71	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Laboratorium IPA	600.000.000	594.936.000	100	99,16
72	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	500.000.000	496.849.000	100	99,37

73	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	720.475.068	713.539.552	100	99,04
		220.475.068	217.659.552	100	98,72
		500.000.000	495.880.000	100	99,18
74	Pengadaan Mebel Sekolah	868.690.984	841.636.000	100	96,89
		700.000.000	698.160.000	100	99,74
		11.090.984	-	100	-
		157.600.000	143.476.000	100	91,04
75	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	705.110.000	704.733.600	100	99,95
		205.110.000	204.933.600	100	99,91
		500.000.000	499.800.000	100	99,96
76	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	3.700.850.000	3.633.012.327	100	98,17
77	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	992.000.000	983.847.810	100	99,18
78	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.000.000.000	995.553.670	100	99,56
		500.000.000	496.669.670	100	99,33
		500.000.000	498.884.000	100	99,78
79	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300.000.000	299.720.000	100	99,91
80	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Menengah Atas	100.000.000	100.000.000	100	100,00
81	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	8.489.440.000	6.422.734.700	100	75,66
82	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	410.800.000	409.600.000	100	99,71
VI	Penyediaan Pendidikan Layanan Khusus Bagi OAP	14.808.858.000	12.260.894.409	100	82,79
83	Penyediaan Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah menengah Pertama	7.147.385.200	7.047.280.200	100	98,60
84	Penyediaan Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah menengah Atas	7.661.472.800	5.213.614.209	100	68,05

VI	Penyediaan Pendidikan Layanan Khusus Bagi OAP	14.808.858.000	12.260.894.409	100	82,79
83	Penyediaan Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah menengah Pertama	7.147.385.200	7.047.280.200	100	98,60
84	Penyediaan Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah menengah Atas	7.661.472.800	5.213.614.209	100	68,05
VII	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	24.135.929.601	21.736.125.760	100	90,06
85	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.580.597.489	1.567.812.000	100	99,19
		453.199.489	444.170.000	100	98,01
		1.127.398.000	1.123.642.000	100	99,67
86	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	810.000.000	806.782.000	100	99,60
87	Pembangunan Ruang Laboratorium	5.552.399.452	5.527.819.448	100	99,56
88	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	721.277.640	715.690.000	100	99,23
89	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.530.892.060	1.518.165.000	100	99,17
		494.441.060	486.916.000	100	98,48
		1.036.451.000	1.031.249.000	100	99,50
90	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	500.000.000	493.501.000	100	98,70
91	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	500.000.000	340.913.777	100	68,18
92	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	500.000.000	497.600.000	100	99,52
93	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	500.000.000	496.989.000	100	99,40
94	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000	486.786.600	100	97,36

95	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	500.000.000	498.515.470	100	99,70
96	Rehabilitasi Kantin Sekolah	700.000.000	690.006.000	100	98,57
97	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	420.000.000	416.830.000	100	99,25
98	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.219.371.360	2.212.471.000	100	99,69
		1.918.571.360	1.911.891.000	100	99,65
		300.800.000	300.580.000	100	99,93
99	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.299.150.000	2.290.701.000	100	99,63
100	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	400.000.000	400.000.000	100	100
101	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	800.000.000	798.957.860	100	99,87
		300.000.000	299.326.050	100	99,78
		500.000.000	499.631.810	100	99,93
102	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	270.000.000	268.520.000	100	99,45
103	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	807.781.600	693.645.704	100	85,87
104	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	3.024.460.000	1.014.419.901	100	33,54
C	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	850.000.000	846.265.500	100	99,56
I	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000	846.265.500	100	99,56
1	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	200.000.000	200.000.000	100	100
2	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	200.000.000	197.865.500	100	98,93
3	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	200.000.000	198.400.000	100	99,20
4	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	100	100

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	550.000.000	547.012.960	100	99,46
A	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	200.000.000	200.000.000	100	100
I	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	100	100
1	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	200.000.000	200.000.000	100	100
B	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	350.000.000	347.012.960	100	99,15
I	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	350.000.000	347.012.960	100	99,15
1	Pengembangan Cagar Budaya	350.000.000	347.012.960	100	99,15
	JUMLAH	510.704.226.590	489.435.920.547	100	95,84

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024 fisik dan keuangan pembangunan Kota Jayapura keadaan bulan Desember Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 510.704.225.590,- Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 489.435.920.547,- prosentasi keuangan 95,84%.

Dalam penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2024 dan disesuaikan dengan kebutuhan Efisiensi dalam bidang pendidikan yaitu yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

Intervensi utama pemerataan layanan pendidikan fokus pada pemberian bantuan pendidikan baik bagi peserta didik maupun bagi satuan pendidikan sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan semakin terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Laporan kinerja adalah rangkuman kerja, baik perorangan maupun instansi yang mana nantinya bisa menjadi perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dan hasil rencana anggaran yang telah ada sebelumnya. Riview hasil juga menjadi bentuk akuntabilitas pelaksanaan suatu tugas.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja utama ini adalah :

- a. meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar
- b. keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- c. terdapat regulasi daerah yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah, seperti peraturan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan dasar.

Analisis penyebab keberhasilan / peningkatan dan kegagalan / penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura sebagai berikut :

N O	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISA SI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN
		Indeks Pendidikan					
1.	Tersedianya dan Terjangkaunya Akses Pendidikan Bagi Anak Usia Dini Sekolah Secara Berkeadilan	Angka Partisipasi Kasar (APK) :					
		Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	85,00	80,62	94,85	Sangat Baik	Partisipasinya Masyarakat Dikarenakan Pengetahuan Akan Pentingnya Pendidikan Usia Dini
		Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal	85,00	88,23	103,8	Sangat Baik	Partisipasi Penduduk Yang Sedang Mengenyam Pendidikan Sesuai Dengan Jenjang Pendidikannya
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	86,00	102,66	119.37	Sangat Baik	Partisipasi Penduduk Yang Sedang Mengenyam Pendidikan Sesuai Dengan Jenjang Pendidikannya
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B	96,00	98,70	102.81	Sangat Baik	Partisipasi Penduduk Yang Sedang Mengenyam Pendidikan Sesuai Dengan Jenjang Pendidikannya
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MTs/Paket C	71,00	119,10	167.75	Sangat Baik	Partisipasi Penduduk Yang Sedang Mengenyam Pendidikan Sesuai Dengan Jenjang Pendidikannya
		Angka Partisipasi Murni (APM) :					
		Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun SD / MI / SDLB / Paket A	78,00	80,38	103.05	Sangat Baik	Partisipasi Daya Serap Penduduk Usia Sekolah Sesuai Standar Jenjang Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun SMP / MTs / SMPLB / Paket B	70,05	57,93	82.70	Sangat Baik	Partisipasi Daya Serap Penduduk Usia Sekolah Sesuai Standar Jenjang Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni Usia 15-18 Tahun SMA/SMK/MTs/Paket C	49,71	44,41	89.34	Sangat Baik	Partisipasi Daya Serap Penduduk Usia Sekolah Sesuai Standar Jenjang Pendidikan
2.	Tersedianya dan Terjangkaunya Akses Pendidikan Bagi Remaja Dan Orang Dewasa Putus Sekolah	Angka Melek Huruf (AMH)					
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	99,70	99,54	99.84	Sangat Baik	Sangat tercapai Yang Berarti Anak-

							Anak Berusia 7 Tahun Memiliki Peluang Untuk Menamatkan Pendidikan
3.	Tersedianya Layanan Pendidikan Sekolah Yang Bermutu Dan Berwawasan Lingkungan	Cakupan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan:					
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang PAUD	90,00	97,75	108.61	Sangat Baik	Tercapai Dalam Menunjang Keberlangsungan Proses Pendidikan
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SD	90,00	85,00	94.44	Sangat Baik	Tercapai Dalam Menunjang Keberlangsungan Proses Pendidikan
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMP	90,00	83,51	92.79	Sangat Baik	Tercapai Dalam Menunjang Keberlangsungan Proses Pendidikan
		Prosentase Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMA/SMK	90,00				
		Prosentase Sekolah Yang Mencapai SPM :					
		Prosentase PAUD Formal Yang Mencapai SPM	100				
		Prosentase Sekolah Dasar Yang Mencapai SPM	100,00	95,00	95.00	Sangat Baik	Tercapai Dalam Menunjang Keberlangsungan Proses Pendidikan
		Prosentase SMP Yang Mencapai SPM	100,00	83,51	83.51	Sangat Baik	Tercapai Dalam Menunjang Keberlangsungan Proses Pendidikan
		Prosentase SMA/SMK Yang Mencapai SPM	100				
		Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi :					
		Prosentase Satuan PNF Yang Terakreditasi	95,00				
		Prosentase Satuan SD Yang Terakreditasi	100,00	100,00	100.00	Sangat Baik	Telah Memenuhi Ketentuan Pelaksanaan Akreditasi
		Prosentase Satuan SMP Yang Terakreditasi	100,00	90,34	90.34	Sangat Baik	Telah Memenuhi Ketentuan Pelaksanaan Akreditasi
		Prosentase Satuan SMA/SMK Yang Terakreditasi	100,00				
4.	Meningkatnya Efektifitas Dan Relevansi Layanan Pendidikan	Angka Putus Sekolah :					

	Angka Putus Sekolah SD	0,00	0,001	100%	Sangat Baik	Faktor Yang Menjadi Penyebab yaitu Dari Siswa Sendiri, Juga Faktor Eksternal Yang Berasal Dari Keluarga Dan Pengaruh Lingkungannya
	Angka Putus Sekolah SMP	0,00	1,55	100%	Sangat Baik	Faktor Yang Menjadi Penyebab yaitu Dari Siswa Sendiri, Juga Faktor Eksternal Yang Berasal Dari Keluarga Dan Pengaruh Lingkungannya
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,00	0,00	100%	Sangat Baik	Faktor Yang Menjadi Penyebab yaitu Dari Siswa Sendiri, Juga Faktor Eksternal Yang Berasal Dari Keluarga Dan Pengaruh Lingkungannya
	Angka Kelulusan :					
	Angka Kelulusan Paket A	100%	100%	100%	Sangat Baik	Tercapai 100% Karena Partisipasi/Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
	Angka Kelulusan Paket B	100%	100%	100%	Sangat Baik	Tercapai 100% Karena Partisipasi/Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
	Angka Kelulusan Paket C	100%	100%	100%	Sangat Baik	Tercapai 100% Karena Partisipasi/Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
	Angka Kelulusan SD	100%	100%	100%	Sangat Baik	Tercapai 100% Karena Partisipasi/Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
	Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100%	Sangat Baik	Tercapai 100% Karena Partisipasi/Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
	Angka Kelulusan SMA/SMK	100%	100%	100%	Sangat Baik	Tercapai 100% Karena Partisipasi / Dukungan Dari Masyarakat Dan

							Lembaga Pendidikan
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah :					
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SD	75,00	78,00	104,00%	Sangat Baik	Tercapai Karena Partisipasi / Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP	78,00	78,00	100,00%	Sangat Baik	Tercapai Karena Partisipasi / Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA/SMK	78,00				
		Angka Melanjutkan :					
		Angka Melanjutkan Siswa SD	100%	100%	100%	Sangat Baik	Tercapai Karena Partisipasi / Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
		Angka Melanjutkan Siswa SMP	100%	100%	100%	Sangat Baik	Tercapai Karena Partisipasi / Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
		Angka Melanjutkan Siswa SMA/SMK	100%	100%	100%	Sangat Baik	Tercapai Karena Partisipasi / Dukungan Dari Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan
5	Tersedianya lulusan pendidikan kejuruan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	Prosentase Lulusan Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup yang bekerja dan berwirausaha	100%				
6	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	Prosentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Standar Nasional :					
		Prosentase Guru PAUD Formal yang memiliki kualitas S-1	100,00				
		Prosentase Guru SD yang memiliki kualitas S-1	85,00	96,00	112.94	Sangat Baik	Guru Sd Memiliki Kualitas S-1
		Prosentase Guru SMP yang memiliki kualitas S-2	83,00	4,99	6.01		
		Prosentase Guru SMA/SMK yang memiliki kualitas S-2	80,00				

		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SD	95,00	90,00	94,74%	Sangat Baik	Guru Memenuhi Kualifikasi Kompetensi Yang Diharapkan Dalam Dunia Pendidikan
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMP	60,00	97,00	161.67%	Sangat Baik	Guru Memenuhi Kualifikasi Kompetensi Yang Diharapkan Dalam Dunia Pendidikan
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMA/SMK	60,00				
7.	Terselenggaranya pendidikan kebudayaan diseluruh jenjang pendidikan	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Berbasis Budaya Lokal	Nilai				
		Kurikulum Lokal	100				
8.	Meningkatnya perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya	Cakupan Gelar Seni Dan Budaya					
		Prosentase Cerita Rakyat Bahasa Port Numbay	100%	100%	100%	Sangat Baik	Nilai-Nilai Sosial Dan Budaya Salah Satunya Bahasa Port Numbay Sangat Mendapat Apresiasi Dari Masyarakat
		Prosentase Pelestarian Bahasa Port Numbay	100%	100%	100%	Sangat Baik	Nilai-Nilai Sosial Dan Budaya Salah Satunya Bahasa Port Numbay Sangat Mendapat Apresiasi Dari Masyarakat
9	Tersedianya Sistem Tata Kelola Yang Handal Dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima	Prosentasi Temuan BPK / Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	85%	85%	100%	Sangat Baik	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77,00	78,00	101.30	Sangat Baik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat memuaskan
		Nilai Evaluasi AKIP	B+ (72,52)	B+ (73,42)	98,77	Sangat Baik	Nilai Evaluasi AKIP mengalami peningkatan
10	Tersedianya SDM Yang Handal Dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Dan Efisiensi	Prosentase Pegawai Yang Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Dan Kompetensi :					
		Prosentase Pegawai Yang Memenuhi Standar Minimal S-1	90%	81,18%	97,13%	Sangat Baik	Pegawai Yang Memenuhi Standar Minimal S-1 Masih Kurang

		Prosentase Pegawai Yang Memperoleh Diklat Teknis Fungsional	35				

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mengukur Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 48 indikator kinerja, adapun realisasinya 39 indikator capaiannya sangat baik.

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya antusiasme masyarakat untuk peran serta dalam pendidikan dan adanya anggaran yang tersedia dalam tersedia melalui APBD maupun dari Pemerintah Pusat.

Capaian indikator kinerja ini mencapai 100% lebih atau melebihi target yang ditetapkan. Faktor utama yang mendukung tercapainya indikator ini adalah animo masyarakat dan Lembaga yang mendirikan satuan pendidikan, disamping adanya regulasi yang mendukung seperti, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Jayapura Tahun 2024 disusun secara obyektif sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Saran dan arahan perbaikan Kami harapkan dari pihak terkait demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LKjIP mendatang.

A. *KESIMPULAN*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jayapura.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Jayapura tahun 2024 bisa disimpulkan berhasil.

Indikasi keberhasilan tersebut dibuktikan dengan nilai capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan keberhasilan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tidak akan berbangga diri, karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin kompleks.

B. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2024, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura harus melakukan langkah-langkah guna pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang, antara lain :

1. Melakukan pendataan dan monitoring evaluasi terkait kondisi dan kebutuhan sarana prasarana lembaga satuan pendidikan untuk segera ditindak lanjuti baik berupa rehabilitasi, pembangunan ataupun pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
2. Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap guru dan kepala sekolah yang belum memenuhi kompetensi serta melakukan evaluasi terhadap kemungkinan permasalahan yang menjadi penyebabnya. Bagi guru dan kepala sekolah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diusulkan untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi dan selanjutnya mengikuti ujian kompetensi dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) akan terus dihimbau dan didorong untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan linearitas dan profesionalitas sebagai Guru dan Kepala Sekolah.
3. Melakukan kajian terkait bangunan yang terindikasi cagar budaya.

Jayapura, 31 Januari 2025

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Jayapura**



Abdul Majid, S. Pd, M. MPd
Pembina Tingkat I
Nip: 19740328 200008 1 001